
Perdamaian Konflik Saudara Di Puncak Papua Tahun 2021

Jovan Bart Saputra¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi (9pt)

* Email Korespondensi: jovanbartsaputra9@gmail.com

Abstract

This research aims. To describe the dynamics of the armed conflict that occurred in Puncak Regency, Papua in 2021 and the process of social and cultural reconciliation. Which took place after the conflict until 2023. This research uses a descriptive qualitative approach by describing the roots of the conflict, the escalation of violence, the role of actors, and the effectiveness of community-based peace mechanisms. The results of this research show that the roots of the conflict stem from local political issues, economic marginalisation of indigenous Papuans, and identity stigma. Peace efforts through cultural approaches, such as the 'Bakar Honai' ritual and traditional festivals, as well as multicultural education have proven effective in creating social stability. This research focuses on strengthening the role of local actors and institutions in peace education for the sustainability of reconciliation.

Keywords: Papua conflict, TPNPB-OPM, Reconciliation, Conflict Transformation, Peace

Abstrak

Penelitian ini bertujuan. Untuk mendeskripsikan dinamika konflik bersenjata yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua pada tahun 2021 serta proses rekonsiliasi social dan budaya. Yang berlangsung pasca konflik hingga tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menguraikan akar konflik, eskalasi kekerasan, peran actor, serta efektivitas mekanisme perdamaian berbasis komunitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akar konflik bersumber dari persoalan politik local, marginalisasi ekonomi orang asli Papua, dan stigma identitas. Upaya perdamaian melalui pendekatan budaya, seperti ritual "Bakar Honai" dan festival adat, serta oendidikan multicultural terbukti efektif dalam menciptakan stabilitas social. Penelitian ini berfokus pada penguatan peran actor local dan institusional Pendidikan damai untuk keberlanjutan rekonsiliasi.

Kata Kunci: Konflik Papua, TPNPB-OPM, Rekonsiliasi, Transformasi Konflik, Perdamaian

Tentang Penulis:

Jovan Bart Saputra merupakan mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dan sedang menempuh semester 6 pada tahun akademik berjalan. Fokus minat penulis berada pada kajian studi perdamaian, resolusi konflik, dan dinamika politik global. Penelitian ini merupakan bagian dari pengembangan akademik penulis dalam memahami pendekatan-pendekatan lokal terhadap penyelesaian konflik yang relevan dengan konteks Indonesia. Email: jovanbartsaputra9@gmail.com

PENDAHULUAN

Papua adalah wilayah yang memiliki sejarah panjang terkait konflik sosial dan politik sejak masuk menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, Papua tidak hanya menjadi daerah yang diprioritaskan dari segi pembangunan, tetapi juga menjadi episentrum konflik yang berkerpanjangan antara kelompok separatis dan aparat keamanan. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Konflik yang terjadi di daerah ini mencerminkan kompleksitas persoalan yang semata-mata tidak bersifat militeristik, tetapi juga berakar dari perbedaan pandangan (BBC News Indonesia, 2023). Dan ideologis, ketimpangan ekonomi, marginisasi budaya, dan kegagalan kebijakan publik yang inklusif.

Kabupaten Puncak menjadi fokus nasional pada tahun 2021, Ketika terjadinya peningkatan eskalasi kekerasan bersenjata yang menimbulkan dampak pelanggaran HAM yang signifikan. Peristiwa penembakan terhadap tenaga pendidik di Distrik Beoga dan serangan terhadap pos TNI di Ilaga menunjukkan bahwa konflik ini telah menunjukkan eskalasinya. Hal ini menunjukkan bahwa konflik ini telah memasuki fase kekerasan dengan munculnya serangkaian insiden kekerasan. Akibatnya lebih dari 3.000 orang mengungsi dan puluhan korban jiwa, serta mengakibatkan terganggunya layanan dasar seperti pendidikan dan Kesehatan (Ayomi Amindoni, 2018).

Konflik di Puncak melibatkan warga lokal, tokoh adat, dan pendatang, serta menciptakan polarisasi antara komunitas yang mendukung negara dan yang pro-kemerdekaan. Polarisasi ini diperparah oleh narasi yang berkembang di masyarakat, seperti stigmatisasi terhadap orang asli Papua sebagai "pro-OPM" dan pendatang sebagai "antek pemerintah" (Elza Astari Retaduari, 2017). Ketegangan identitas ini tidak hanya menyebabkan disintegrasi sosial, tetapi juga memperlemah rasa percaya antar kelompok masyarakat.

Faktor sejarah turut menjadi penyumbang akar konflik. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 yang tidak terselesaikan dengan baik menandai titik awal ketegangan struktural (HUMAS MKRI, 2025). Masyarakat merasakan bahwa proses politik tidak memberikan keadilan bagi representasi lokal, sementara kebijakan pemekaran wilayah (DOB) yang dilakukan tanpa persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) memperparah ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Ditambah dengan ketimpangan ekonomi, di mana akses terhadap pekerjaan dan sumber daya lebih banyak dinikmati oleh pendatang, orang asli Papua merasa termarginalkan di tanahnya sendiri.

Dari sisi ekonomi, masyarakat lokal menghadapi berbagai hambatan struktural yang menghalangi mereka dalam mengakses peluang Pembangunan infrastruktur yang minim, kurangnya pendidikan yang merata, serta sistem distribusi ekonomi yang tidak adil memperlemah posisi tawar mereka dalam sektor informal maupun formal (BBC News Indonesia, 2023). Hal ini mendorong sebagian pemuda Papua untuk bergabung dengan kelompok bersenjata karena merasa tidak memiliki alternatif kehidupan yang layak. Ketidaksetaraan ini menciptakan kemarahan kolektif yang mudah disulut oleh isu politik dan identitas etnis.

Intervensi budaya luar sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal. Program pembangunan dan keamanan seringkali mengabaikan peran penting adat dalam proses pengambilan keputusan masyarakat Papua. Padahal, dalam tradisi masyarakat pegunungan Papua Tengah, seperti suku Damal dan Dani yang dominan di Puncak, mekanisme adat memiliki legitimasi kuat dalam menyelesaikan konflik dan menjaga harmoni sosial. Pengabaian terhadap pendekatan lokal ini menyebabkan program-program pemerintah tidak mendapatkan kepercayaan, bahkan menimbulkan resistensi yang berujung pada konflik terbuka.

LANDASAN TEORITIK

Teori *conflict transformation* yang dikembangkan oleh John Paul Lederach menjadi salah satu pendekatan penting dalam studi perdamaian dan resolusi konflik kontemporer, khususnya dalam konteks konflik sosial-politik yang bersifat berlarut-larut dan struktural. Lederach (1997) mengemukakan bahwa konflik tidak hanya perlu diselesaikan (*conflict resolution*) atau dikelola (*conflict management*), melainkan harus ditransformasikan. Artinya, konflik dipandang sebagai peluang untuk menciptakan perubahan positif yang menyentuh akar masalah, relasi antar kelompok, dan struktur sosial yang timpang.

Dalam perspektif Lederach, transformasi konflik merupakan proses jangka panjang yang melibatkan perubahan sistem relasi antara pihak-pihak yang berkonflik, menciptakan struktur sosial yang lebih adil, serta menumbuhkan rekonsiliasi melalui keterlibatan aktif masyarakat lokal. Proses ini tidak hanya fokus pada penghentian kekerasan (*negative peace*), tetapi juga pada pembangunan hubungan yang lebih sehat dan adil (*positive peace*) melalui dialog, partisipasi, dan penguatan kapasitas lokal dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan (John Paul Lederach, 1997).

Teori ini digunakan sebagai landasan analisis dalam konflik di Kabupaten Puncak, Papua, karena konflik tersebut tidak hanya dipicu oleh faktor kekuasaan atau kekerasan bersenjata, tetapi juga merupakan hasil perhitungan dari *historical* yang tumpang tindih antara negara dan masyarakat Papua. Ketidakadilan struktural, marjinalisasi ekonomi, dan stigmatisasi identitas menjadi bagian dari akar konflik yang tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan keamanan semata. Oleh karena itu, pendekatan Lederach yang menekankan pada transformasi relasi dan struktur sosial menjadi landasan teoretik yang sesuai untuk menganalisis dinamika konflik ini.

Salah satu konsep kunci dalam pendekatan Lederach adalah pentingnya *peacebuilding* berbasis komunitas yang mengedepankan peran aktor lokal. Dalam kasus Papua, khususnya di Puncak, hal ini tercermin melalui inisiatif rekonsiliasi berbasis adat seperti ritual “Bakar Honai”, forum “Puncak Damai”, dan festival budaya “Lembah Baliem” yang memperkuat kohesi sosial. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana masyarakat lokal dapat menjadi agen perdamaian melalui nilai-nilai budaya yang mereka miliki, yang sekaligus memperkuat legitimasi proses perdamaian di mata masyarakat.

Selain itu, Lederach juga menekankan pentingnya membangun *infrastructure for peace*, yakni menciptakan sistem sosial yang memungkinkan resolusi konflik secara damai. Implementasi modul “Pendidikan Multikultural” di sekolah-sekolah di Puncak adalah salah satu bentuk dari infrastruktur perdamaian yang bertujuan mentransformasikan cara generasi muda memahami keberagaman, konflik, dan rekonsiliasi. Ini sejalan dengan visi Lederach bahwa transformasi konflik harus melibatkan proses pendidikan dan pembentukan kesadaran kolektif baru.

Dengan demikian, teori *conflict transformation* oleh Lederach memberikan kerangka analisis yang komprehensif dan kontekstual untuk memahami serta mengevaluasi strategi perdamaian di Puncak. Teori ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses transformasi, serta menekankan pentingnya integrasi antara pendekatan budaya, struktural, dan simbolik dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, rekonsiliasi di Puncak dapat dipahami bukan sekadar sebagai penghentian konflik, tetapi sebagai proses mendalam untuk memulihkan relasi sosial, membangun kepercayaan, dan menciptakan tatanan yang lebih adil dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya yang dilakukan pada kondisi alamiah (*natural settings*) (Creswell, 2013). Metode kualitatif sering ditemui dalam penelitian bidang sosial budaya sebagai metode kualitatif karena data yang diperoleh dan dianalisa tidak menggunakan angka-angka statistik (Sugiyono, 2013).

Penelitian kualitatif menekankan pada pendekatan yang berorientasi pada fenomena alamiah. Dalam penerapannya, jenis penelitian ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian sebagai upaya melihat resolusi konflik dalam konflik di Ethiopia dengan Tigray pada tahun 2019-2020 dengan pendekatan triangle of satisfaction. Penelitian kualitatif ditujukan untuk menjelaskan hasil dari penelitian mengenai bagaimana upaya resolusi konflik pada konflik di Ethiopia pada 2019-2020 dalam bentuk narasi tanpa menggunakan perhitungan lainnya yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik di Puncak dapat dibagi ke dalam empat fase utama. Fase pertama (2011–2020) mencakup pembentukan akar konflik, yang diawali dari sengketa Pilkada tahun 2011 yang memunculkan ketegangan politik, serta meningkatnya marginalisasi ekonomi orang asli Papua sejak 2016. Fase kedua (2021) merupakan masa eskalasi, dengan peristiwa penting seperti penembakan guru di Beoga (April 2021) dan serangan TPNPB di Ilaga (Juni 2021), yang menyebabkan lebih dari 3.000 warga mengungsi. Fase ketiga (2021–2022) memasuki krisis kemanusiaan, dengan terjadinya gizi buruk di pengungsian serta pembakaran fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas. Fase keempat (2022–2023) adalah masa rekonsiliasi, ditandai oleh upaya mediasi melalui mekanisme adat dan dialog.

Teori *conflict transformation* yang dikembangkan oleh John Paul Lederach menjadi dasar analisis yang sangat relevan dalam memahami dinamika konflik di Kabupaten Puncak, Papua. Konflik yang terjadi tidak sekadar konflik fisik antarkelompok, tetapi merupakan akumulasi dari relasi sosial yang timpang, marginalisasi ekonomi, eksklusi politik, dan perpecahan identitas yang berlangsung selama bertahun-tahun. Lederach menyatakan bahwa konflik harus ditransformasikan bukan hanya diselesaikan dengan menasar akar struktural dan relasional dari konflik tersebut (John Paul Lederach, 1997). Pendekatan inilah yang kemudian menjadi lensa untuk menilai strategi perdamaian yang diterapkan di Puncak pasca-eskalasi kekerasan tahun 2021.

Salah satu dimensi utama dari *conflict transformation* adalah kebutuhan untuk mengubah relasi sosial yang rusak antara kelompok yang berkonflik. Dalam kasus Puncak, konflik antara kelompok pro-pemerintah (yang didukung aparat keamanan dan sebagian warga pendatang) dan kelompok pro-kemerdekaan (TPNPB-OPM) telah menyebabkan polarisasi sosial yang dalam (HUMAS MKRI, 2025). Polarisasi ini tidak hanya menyangkut posisi politik, tetapi juga memperkuat stigma identitas—misalnya, persepsi bahwa orang asli Papua yang kritis terhadap pemerintah otomatis dicap sebagai pendukung OPM. Transformasi konflik menuntut agar hubungan yang terpecah ini dipulihkan melalui dialog yang bermakna, empati, dan rekonstruksi kepercayaan.

Ritual adat “Bakar Honai” yang dilaksanakan pada Maret 2022 menjadi contoh nyata dari penerapan pendekatan Lederach dalam konteks lokal (Randy Zethdan Pellokila, 2021). Dalam praktik budaya Papua, ritual ini bukan hanya simbol rekonsiliasi, tetapi juga wadah untuk menyampaikan penyesalan, menerima maaf, dan memperbarui ikatan sosial yang rusak. Dalam teori Lederach, inisiatif seperti ini mencerminkan pendekatan bottom-up peacebuilding yaitu upaya perdamaian yang tumbuh dari nilai-nilai komunitas dan aktor lokal, bukan semata-mata dari instruksi negara atau lembaga internasional. Keterlibatan tokoh adat dalam proses ini sangat penting karena mereka memiliki legitimasi budaya dan spiritual yang diakui semua pihak.

Lebih lanjut, forum “Puncak Damai” yang diinisiasi pada 2022 juga mencerminkan pentingnya dialog lintas pihak dalam transformasi konflik. Forum ini mempertemukan berbagai pihak pemerintah daerah, perwakilan masyarakat adat, Komnas HAM, serta tokoh-tokoh pemuda dan Perempuan untuk membicarakan masa depan Puncak secara terbuka (Latif & Shiddiqy, 2023). Dialog dalam konflik tersebut adalah komponen utama reconciliation

karena memberi ruang bagi narasi-narasi yang sebelumnya tidak terlihat karena teralihkan oleh kekerasan. Dialog membantu menciptakan pemahaman lintas identitas dan memperkuat empati sosial.

Selain aspek relasional, Lederach menekankan bahwa transformasi konflik juga harus menyentuh dimensi struktural. Konflik di Papua tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan ekonomi dan akses terhadap sumber daya. Ketika orang asli Papua terus-menerus terpinggirkan dalam sektor ekonomi dan pelayanan publik, mereka merasa tidak memiliki tempat dalam sistem negara. Di Puncak, upaya pelatihan pertanian bagi mantan kombatan adalah bagian dari strategi transformasi ekonomi. Program ini tidak hanya memberikan keahlian praktis, tetapi juga membuka peluang reintegrasi sosial, sekaligus menunjukkan bahwa para mantan pejuang tidak dimusuhi, melainkan diajak untuk membangun kembali masyarakatnya (Luqman Al Hakim & Dudung Abdurahman, 2023).

Upaya transformasi juga diarahkan pada penciptaan *infrastructure for peace*, atau infrastruktur perdamaian jangka panjang. Salah satu inisiatif strategis adalah pembangunan tugu perdamaian di Ilaga dan penerapan modul “Pendidikan Multikultural” di sekolah-sekolah. Modul ini bertujuan membentuk kesadaran sejak dini tentang pentingnya keberagaman, toleransi, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Lederach memandang pendidikan sebagai sarana penting untuk menciptakan generasi baru yang mampu mempertahankan perdamaian. Pendidikan multikultural ini juga sekaligus menjadi koreksi terhadap narasi tunggal tentang nasionalisme yang kerap menyingkirkan identitas lokal.

Dampak nyata dari pendekatan transformasional ini terlihat dari berkurangnya kekerasan pasca-2022. Berdasarkan laporan LBH Papua, sejak ritual adat dan dialog dilaksanakan, tidak tercatat insiden kekerasan besar di wilayah Puncak. Bahkan, 80% pengungsi telah kembali ke tempat asal mereka, dan kehidupan masyarakat mulai kembali berjalan. Ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberikan ruang untuk menyelesaikan konflik dengan cara mereka sendiri dengan tetap didukung oleh negara dan lembaga pendamping maka perdamaian bukanlah hal yang mustahil dicapai (Elza Astari Retaduari, 2017).

Namun transformasi konflik bukanlah proses instan. Trauma psikologis yang dialami oleh masyarakat, baik akibat kehilangan anggota keluarga maupun pengalaman pengungsian, masih menjadi beban sosial yang berat. Aspek ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam bentuk layanan psikososial dan pemulihan trauma yang berbasis komunitas. Upaya pemulihan ini penting agar perdamaian tidak hanya tercipta di permukaan, tetapi juga dalam jiwa masyarakat yang pernah terluka oleh kekerasan.

Tantangan lain adalah keterbatasan ruang sipil bagi kelompok yang masih memiliki aspirasi politik yang berbeda, khususnya yang terkait dengan isu kemerdekaan. Pendekatan *conflict transformation* tidak menyarankan penindasan terhadap perbedaan pandangan, tetapi justru mendorong terbentuknya ruang dialog yang aman dan inklusif (Suropati, 2020). Tanpa ruang ini, ada potensi relasi sosial kembali retak jika kelompok tertentu merasa dikucilkan atau dibungkam secara politik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga lokal untuk terus membina komunikasi lintas kelompok secara terbuka dan adil.

Sebagai kesimpulan dalam bagian ini, pendekatan *conflict transformation* oleh John Paul Lederach telah terbukti memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami dan mengarahkan proses perdamaian di Puncak (Randy Zethdan Pellokila, 2021). Melalui pendekatan ini, konflik tidak lagi dipahami sebagai sekadar persoalan keamanan, melainkan sebagai masalah relasi sosial yang rusak dan struktur yang tidak adil. Dengan melibatkan aktor lokal, menghidupkan kembali nilai-nilai budaya, memperkuat pendidikan damai, serta membangun keadilan ekonomi, proses transformasi konflik di Puncak dapat menjadi model perdamaian lokal yang berkelanjutan di Indonesia.

SIMPULAN

Penanganan konflik di Kabupaten Puncak, Papua, memberikan pelajaran penting bahwa pendekatan transformasi konflik berbasis komunitas lokal dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam menghadapi konflik horizontal yang berakar dalam struktur sosial-politik. Peran tokoh adat terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan kekerasan negara. Proses rekonsiliasi yang berbasis budaya, simbol, dan pendidikan telah berhasil menurunkan kekerasan secara signifikan. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kapasitas masyarakat adat dalam diplomasi damai, peningkatan layanan psikososial, serta integrasi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum nasional sebagai bentuk pencegahan konflik jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayomi Amindoni. (2018, December 13). *Organisasi Papua Merdeka yang menuntut pemisahan Papua dari Indonesia, apa dan siapa mereka?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502>
- BBC News Indonesia. (2023, January 11). *Konflik Papua: Serangan OPM di Pegunungan Bintang, warga pendatang 'pasrah saja, tunggu dievakuasi.'* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64226326>
- Creswell, J. W. (2013). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Elza Astari Retaduari. (2017, August 17). *Ini Tugu Demokrasi, Tanda Perdamaian Perang Saudara di Puncak Papua* Baca artikel detiknews, "Ini Tugu Demokrasi, Tanda Perdamaian Perang Saudara di Puncak Papua" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-2993446/ini-tugu-demokrasi-tanda-perdamaian-perang-saudara-di-puncak-papua>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>. Detik.News. <https://news.detik.com/berita/d-2993446/ini-tugu-demokrasi-tanda-perdamaian-perang-saudara-di-puncak-papua>
- HUMAS MKRI. (2025, February 24). *Suket Tidak Pernah Terpidana Tidak Sesuai Domisili, Cawagub Papua Terpilih Yermias Bisai Didiskualifikasi*. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22981>
- John Paul Lederach. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press.
- Latif, S. A., & Shiddiqy, M. A. A. (2023). *Dinamika Konflik dan Jejak Perdagangan Senjata Di Tanah Papua*. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(4), 851–865. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2617>
- Luqman Al Hakim, & Dudung Abdurahman. (2023). MODERASI BERAGAMA DI PAPUA: Rekonstruksi Identitas dan Resolusi Kehidupan Keagamaan Pasca Konflik Papua 1998-2001. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(1), 49–64. <https://doi.org/10.14421/jsa.2023.171-04>
- Randy Zethdan Pellokila, J. (2021). Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(08), 1111–1123. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.330>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suropati, U. (2020). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(1), 73–89. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i1.52>
-